

MyRMNews.com

LEBIH PERSONAL, LEBIH AKTUAL!



POLLING

Masih perlukah duet SBY dan Jusuf Kalla dipertahankan?

- Tidak Perlu
 Perlu
 Ragu-ragu

Pilih Hasil

★ Poling Yang Laku

WAWANCARA

Sofjan Wanandi: Kita Harus Punya Pemimpin yang Kuat

GAZEBO

Menyambut Hillary, Hati-hati SBY Dikadali

WHO'S & WHAT'S

Drajat Wibowo, Meliris 9 Lagu

TOP EKSEKUTIF

Anton R. Santoso, Direktur Utama PT Citra Buana Intan

CRIME STORY

Bocah 10 Tahun Dipaksa Layani Nafsu Sang Kakek

BOOKS REVIEW

The 7 Laws of Happiness (Tujuh Rahasia Hidup yang Bahagia)

SUARA PUBLIK

Kontroversi Fatwa Haram Rokok

HIT BERICHT

Menuju ASEAN Community 2015

RUMAH KACA

JURAIDA (Ketika Perdamaian Mahal Harganya)

LUISUZAN

7 Wanita Cantik



Menteri SBY Kesenggol Praktik KKN di BUMN

Sabtu, 13 Mei 2006, 15:45:04 WIB

Laporan: Dudy Novriansyah

Jakarta, Rakyat Merdeka. Menteri Negara BUMN Sugiharto lagi-lagi diduga melakukan praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) melalui surat yang ditujukan ke anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IX dan X.

Surat bernomor S-141/MBU/2006 tertanggal 24 April 2006 dan S-142/MBU/2006 tertanggal 24 April 2006 itu berkaitan pelaksanaan tugas anggota direksi yang masa jabatannya sudah berakhir. Surat ini mengandung pertanyaan dan diduga berbau KKN.

Surat Meneg BUMN itu selain aneh, berani, juga dapat dipersepsikan sarat KKN. Substansi isi surat tersebut hanya menyatakan agar para direksi tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai direksi sampai ditetapkannya anggota direksi yang definitif. Padahal, masa tugas anggota direksi PTPN X berakhir pada 30 April 2006. Berarti, hanya tinggal 6 hari lagi, keluarlah surat Meneg BUMN itu, beber Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), M Julian Manurung dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, siang ini (Sabtu, 13/5).

Tak hanya itu, lanjut Julian, surat tersebut dapat juga diasumsikan bahwa kementerian negara yang saat ini dipimpin Sugiharto kurang mampu mempersiapkan para calon direksi pengganti di PTPN sekaligus tak memiliki sensitifitas meningkatkan kinerja para direksi PTPN.

Meneg BUMN sepertinya lebih siap membuat surat perpanjangan jabatan anggota direksi, sebelum masa jabatannya berakhir daripada menetapkan anggota direksi baru. Ini harus menjadi catatan bagi SBY dalam mencatat kinerja atau rapor Meneg BUMN, papar Julian.

Ditambahkannya, surat perpanjangan masa jabatan anggota direksi yang tanpa batas waktu, selain tak memiliki dampak positif, para anggota direksi yang mendapatkan masa perpanjangan tidak dapat berbuat banyak seperti tidak dapat mengeluarkan atau menetapkan kebijakan-kebijakan yang signifikan, baik ke dalam maupun keluar. **iga**

kirim ke teman print

Baca juga:

- [Kubu PPP Tak Setuju Sugi Dicapot](#)
- [Demokrat Minta Ganti Sugiharto](#)

Tidak ada komentar tentang berita ini.